



## Jurnal Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

<http://journal.trunojoyo.ac.id/agriekonomika>

Agriekonomika Volume 7, Nomor 2, 2018

### Pengaruh Peran Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Terhadap Penyusunan Program Penyuluhan Peternakan di Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung

✉Andi Warnaen, dan Bambang Riyanto  
Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

Received: Mei 2018; Accepted: September 2018; Published: Oktober 2018

DOI: <http://doi.org/10.21107/agriekonomika.v7i2.3544>

#### ABSTRAK

*Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji Peran BP3K dan BPP terhadap penyusunan program penyuluhan peternakan di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kuantitatif, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur Tahun 2016. Jumlah populasi adalah 317 orang, Jumlah sampel 90 orang dengan cara menentukan jumlah sampel yaitu menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 10%. Teknik sampling pada penelitian ini menggunakan teknik propotional random sampling. Variabel penelitian ini yaitu Variabel independent adalah peran BP3K dan BPP. Variabel dependent adalah penyusunan Program Penyuluhan Peternakan. Metode pengumpulan data adalah Wawancara menggunakan kuesioner dan Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Regresi Linier berganda. Hasil penelitian menunjukan Pengaruh BP3K dan BPP secara bersama-sama mempengaruhi dalam penyusunan program penyuluhan peternakan sebesar 57,5%. peran BP3K yang secara langsung terhadap penyusunan program penyuluhan peternakan adalah sebesar 18 %. Sedangkan pengaruh peran BPP yang secara langsung terhadap penyusunan program penyuluhan peternakan sebesar 64,7 %.*

**Kata kunci:** Kelembagaan Penyuluhan, Penyuluh Pertanian, Peternakan

Effect of the Role of Institution Agreement of Agriculture on Development Livestock  
Release Program in Trenggalek and Tulungagung District

#### ABSTRACT

*The purpose of this study was to examine the role of BP3K and BPP on the preparation of livestock extension programs in Trenggalek and Tulungagung Regencies. The research approach is a quantitative approach, this study was conducted in Trenggalek and Tulungagung Regencies, East Java Province in 2016. The population was 317 people, the number of samples was 90 people by determining the number of samples using the Slovin formula with an error rate of 10%. The sampling technique in this study used a propotional random sampling technique. The variables of this study are independent variables are the role of BP3K and BPP. The dependent variable is the preparation of the Livestock Extension Program. The method of data collection is an interview using questionnaires and documentation. The data analysis technique used is the analysis of multiple linear regression. The results of the study showed the influence of BP3K and BPP jointly influencing the preparation of livestock extension programs by 57.5%. the role of BP3K which directly affects the preparation of livestock extension programs is 18%. While the influence of the role of the BPP directly on the preparation of livestock extension programs is 64.7%.*

**Keywords:** Institutional Extension, Agricultural Extension, Livestock

**Cite this as:** Warnaen, A., & Riyanto, B. (2018). Pengaruh Peran Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Terhadap Penyusunan Program Penyuluhan Peternakan di Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung. *Agriekonomika*, 7(2). 129-134. <http://doi.org/10.21107/agriekonomika.v7i2.3544>

✉ Corresponding author :  
Address : Jl. DR. Cipto No.144a, Sengkrajan, Bedali,  
Lawang, Malang  
Email : [warnaenand1@gmail.com](mailto:warnaenand1@gmail.com)  
Phone :

© 2018 Universitas Trunojoyo Madura  
p-ISSN 2301-9948 | e-ISSN 2407-6260

## PENDAHULUAN

Undang-undang No. 16 tahun 2006 menjelaskan yang dimaksud dengan Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, adalah proses pembelajaran bagi Petani/pelaku utama serta pelaku usaha agar mampu dan mau menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pertanian yang dimaksud undang-undang No. 16 tahun 2016 mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu program penyuluhan pertanian adalah kegiatan peningkatan produksi daging dan protein hewani. Tujuan pembangunan pertanian tidak akan terwujud apabila tidak ditunjang dengan penyiapan SDM peternak yang berkualitas, sehingga perlu dilakukan kegiatan penyuluhan bagi peternak-peternak guna mendukung program pembangunan nasional yaitu swasembada pangan khususnya produk peternakan.

Kegiatan penyuluhan sangatlah penting dalam mendukung program pembangunan pertanian, sehingga peran penyuluh dalam pembangunan pertanian khususnya bidang peternakan sangatlah dibutuhkan. Kelembagaan penyuluhan dari tahun ke tahun mengalami perubahan, sebelum tahun 2006 kelembagaan penyuluhan masuk pada kelembagaan dinas pertanian atau dinas peternakan

sehingga tugas pokok dan fungsi penyuluhan melekat sesuai induk dari lembaga penyuluh tersebut.

Tahun 2006 kelembagaan penyuluhan berubah menjadi badan pelaksana penyuluhan pertanian, penyuluh pertanian atau peternakan seluruhnya dijadikan satu atap pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian. Kondisi ini disinyalir berdampak pada SDM, program penyuluhan dan pola koordinasi antar lembaga penyuluhan dan lembaga terkait. Kondisi dilapangan menunjukan bahwa program penyuluhan peternakan sangatlah minim, yang diperparah oleh kondisi SDM Penyuluh yang semakin berkurang dan koordinasi antar birokrasi yang sulit, berdasarkan latar belakang diatas menarik untuk di kaji sejauh mana pengaruh kelembagaan penyuluhan BP3K dan BPP terhadap program penyuluhan peternakan di Kab. Trenggalek dan Kab. Tulungagung Provinsi Jawa Timur.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif untuk maksud pengujian hipotesis, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hubungan sebab akibat yaitu satuan penelitian yang mencari pengaruh dan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya (Sugiyono, 1994). Penelitian ini dilakukan (berlokasi) di Kab. Trenggalek dan Kab. Tulungagung Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2016. Populasi yang dijadikan dalam penelitian ini adalah Kepala/Pimpinan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kepala bidang yang terkait program penyuluhan, dan Penyuluh Pertanian. Adapun jumlah populasi pada penelitian ini adalah 317 orang. Metode penentuan jumlah Sampel yang digunakan adalah rumus Slovin dengan taraf kesalahan 10%, dengan sampel sejumlah 90 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *propotional random sampling*, dengan hasil Kab. Trenggalek sejumlah 40 orang dan Kab. Tulungagung sejumlah 50 orang. Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel

independent, dan variabel dependent. Variabel Bebas (*independent*) adalah BP3K (X1) ditingkat Kabupaten dan BPP (X2) ditingkat Kecamatan. Variabel Terikat (*dependent*) adalah Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Y). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Angket (Kuesioner), Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis Regresi Linier berganda dengan SPSS 20.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh BP3K dan BPP terhadap Penyusunan Program Penyuluhan Peternakan

Tingkat Kecamatan dan Kabupaten Kelembagaan penyuluhan pertanian menurut undang-undang No. 16 tahun 2006 menjelaskan bahwa ditingkat Kabupaten disebut dengan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian sedangkan di tingkat kecamatan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan. Berdasarkan undang-undang tersebut pemerintah daerah menyesuaikan kelembagaan yang ada di daerah yang awalnya penyuluh berada di dinas teknis seperti Dinas Tanaman Pangan atau dinas pertanian bagi penyuluh pertanian dan dinas peternakan bagi penyuluhan peternakan. Mardikanto (2009), Kelembagaan dalam pengertian sehari-hari, diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kelembagaan dalam arti sempit, sering diartikan sebatas entitas (kelompok organisasi) yaitu himpunan individu yang sepakat untuk menetapkan dan mencapai tujuan bersama. Tetapi kelembagaan dalam arti luas, mencakup: nilai-nilai, aturan, budaya, dll. Karena itu, kelembagaan penyuluhan pertanian dapat diartikan sebagai entitas (kelompok, organisasi) yang terpanggil dan atau berkewajiban melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Atas dasar hal tersebut maka pengaruh kelembagaan penyuluhan pertanian terhadap program penyuluhan peternakan dapat dilihat pada hasil perhitungan Besarnya angka R square adalah 0.576. Angka ini digunakan untuk melihat besarnya pengaruh BP3K

(X1); dan BPP (X2); terhadap program Penyuluhan Peternakan yaitu sebesar 57,6%. Sedangkan sisanya sebesar 42,4% dipengaruhi oleh faktor lain yg tidak diteliti. Selanjutnya dilakukan pengujian ada atau tidaknya hubungan linear dilakukan dengan menguji hipotesa hasil perhitungan SPSS menunjukkan Angka sig dari table ANOVA di atas adalah  $0,000 < 0.05$ .  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Ini bermakna ada hubungan linear antara peran BP3K dan BPP dalam proses penyusunan Program Penyuluhan Peternakan. Hal ini dikarenakan BPP merupakan bagian dari BP3K, dan BPP merupakan kepanjangan tangan BP3K yang berada di Kecamatan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa banyak faktor lain yang mempengaruhi program penyuluhan peternakan, salah satunya adalah program penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas peternakan, petani, dan swasta. Peran dinas peternakan yang memiliki anggaran terhadap program peternakan sangat mempengaruhi, sehingga yang terjadi terkadang antara BP3K dan BPP dengan Dinas Peternakan sangat sulit sekali untuk melakukan koordinasi. Menurut Jabal dkk., (2003), menjelaskan bahwa penyuluh dalam menampilkan perannya di tengah-tengah masyarakat, para penyuluh tidak berdiri sendiri, karena dia di tolong oleh kehadiran berbagai pihak, perorangan/ tokoh masyarakat, unit kerja, instansi dan lembaga.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Dinas peternakan merasa bahwa dalam melaksanakan pendampingan peternakan tidak memiliki SDM Penyuluhan yang pada akhirnya SDM yang ada di bawah Dinas Peternakan melakukan penyuluhan tanpa melibatkan penyuluh. Namun sebaliknya penyuluh dalam melakukan pendampingan memerlukan program dari dinas peternakan maupun dinas pertanian, merasa tidak memiliki kegiatan tersebut dikarenakan anggaran dan program melekat pada dinas teknis. Padahal menurut hasil penelitian peran penyuluh Yunasaf dan Tasrifin (2011), menjelaskan bahwa Penyuluh dinilai peternak telah

tergolong cukup perannya. baik dalam perannya sebagai pendidik maupun sebagai fasilitator. Hal-hal yang relatif sudah baik dari penyuluh dalam perannya sebagai pendidik adalah: dalam cara penyampaian materi. materi yang diberikan sudah berhubungan dengan pengetahuan peternak. dan tingkat kemampuan dalam menjelaskan materi. Hal yang dianggap sudah baik dilakukan penyuluh dalam perannya sebagai fasilitator adalah dalam hal pengenalan sumber-sumber informasi. Dilihat dari hasil penelitian tersebut apabila BP3K meningkatkan peran penyuluh dalam bidang peternakan tentunya akan memperbaiki permasalahan peternak.

#### **Pengaruh Peran BP3K terhadap Penyusunan Program Penyuluhan Peternakan**

Menguji pengaruh peran BP3K terhadap penyusunan program penyuluhan peternakan diuji menggunakan uji t (*t test*). Sedang untuk besarnya pengaruh dilihat dari angka Beta atau *Standardized Coefficient* hasil perhitungan SPSS. Hubungan linear antara BP3K dengan Penyusunan Program Penyuluhan Peternakan, dari tabel *Coefficients* diketahui nilai  $\text{sig } 0.033 < 0.05$ . Ini bermakna ada hubungan linear antara BP3K dengan Penyusunan Program Penyuluhan Peternakan. Besarnya pengaruh BP3K adalah 0.180 (angka Beta) atau sebesar 18%. Maknanya adalah pengaruh peran BP3K dalam proses penyusunan program penyuluhan peternakan masih kurang, bahwa program penyuluhan peternakan di BP3K jarang dialokasikan, hal ini sesuai dengan fakta bahwa peran BP3K dalam penyusunan Program lebih dominan pada program penyuluhan dibidang pertanian, padahal makna pertanian secara luas termasuk masalah peternakan. sementara revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan (RPPK), berdasarkan UU No. 16 Tahun 2006, bahwa tugas dari BP3K adalah:

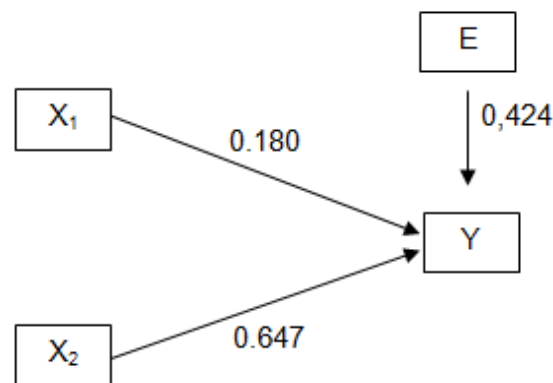
1. Tersusunnya kebijakan dan program penyuluhan kabupaten/kota yang sesuai dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
2. Terlaksananya penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
3. Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama/ Petani/Peternak dan pelaku usaha;
4. Dilakukannya pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
5. menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
6. Dilakukannya peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi menunjukan bahwa sangat sedikit program penyuluhan peternakan dilaksanakan oleh BP3K alasannya sudah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan. BP3K dalam melaksanakan penyuluhan kepada peternak menunggu koordinasi Dinas Peternakan, sedangkan Dinas Peternakan menunggu koordinasi dari BP3K. Peran BP3K yang lemah terhadap penyuluhan peternakan ini diperkuat hasil penelitian Sajow dkk (2014) kasus di Kab. Minahasa Selatan bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh BP3K belum berhasil dan juga tidak efektif, karena kegiatan penyuluhan hanya dapat menjangkau sebagian kecil dari jumlah peternak. Hal ini yang menyebabkan banyak peternak kurang motivasi berusaha akibatnya populasi ternak sapi kurang berkembang.

#### **Pengaruh Peran BPP terhadap Penyusunan Program Penyuluhan Peternakan**

Hubungan linear antara BPP dengan Penyusunan Program Penyuluhan Peternakan, dari tabel *coefficient* diketahui nilai  $\text{sig } 0.000 < 0.05$ . Ini bermakna ada hubungan linear antara BPP dengan Penyusunan Program Penyuluhan





**Gambar 1**

**Hasil Analisis Pengaruh Kelembagaan Penyuluhan Pertanian terhadap Program Penyuluhan Peternakan**

Sumber: Data Primer Diolah, 2017

Peternakan sedangkan besarnya pengaruh BPP adalah 0.647 (angka Beta) atau sebesar 64.7%. Apabila dilihat besarnya pengaruh antara BPP dan BP3K yang paling besar pengaruhnya adalah BPP sebesar 64,7 %, makna angka tersebut peran BPP dalam mengakomodir program penyuluhan peternakan di tingkat kecamatan lumayan besar yaitu sejumlah 64,7%, hal ini disebabkan penyuluh yang berada di Kecamatan langsung berinteraksi dengan para petani yang sekaligus peternak. Namun dikarenakan program penyuluhan lebih banyak program yang bersifat Top Down maka penyuluhan yang bersifat langsung kebutuhan petani/peternak belum maksimal diperhatikan. Sementara amanat undang – undang SP3K menjelaskan bahwa Balai Penyuluhan mempunyai tugas:

- Tersusunnya programa penyuluhan pada tingkat kecamatan sesuai dengan programa penyuluhan kabupaten/kota;
- Programa menjadi dasar pelaksanaan penyuluhan;
- Informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar tersedia dan disebarkan;
- Pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha terfasilitasi;
- peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh

- swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan terfasilitasi; dan
- f. proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha terlaksana.
- g. Balai Penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.

Peran BPP dalam menyusun program penyuluhan pertanian dibidang peternakan dan melaksanakan program penyuluhan peternakan sangat besar karena fungsi dari BPP adalah dari mulai merencanakan penyuluhan sampai pada pelaksanaan sampai pada tingkat evaluasi. Peran BPP perlu dioptimalkan kaitannya perlu dukungan dari BP3K untuk melakukan koordinasi dengan dinas terkait sehingga dapat meningkatkan kinerja penyuluh khususnya dalam program penyuluhan peternakan. Fakta dilapangan penyuluh dengan dinas peternakan sangat sulit koordinasi dikarenakan tidak ada fasilitasi koordinasi oleh BP3K dengan Dinas Peternakan, sehingga kesan yang muncul adalah lembaga penyuluhan hanya menggarap bidang pertaniannya saja, sedangkan bidang peternakan berjalan sendiri – sendiri dan difarap oleh Dinas Peternakan atau yang terkait. Sedangkan menurut Faqih (2014), Peran penyuluh pertanian lapangan dalam kegiatan pemberdayaan kelompok tani sebagai

inisiator, motivator, mediator, supervisor dan fasilitator di Kecamatan Suranenggala berperan dengan skor penilaian anggota kelompok sangat besar. Hasil penelitian Sucihatiningsih dan Waridin (2010) pada model kelembagaan desentralisasi dalam mengumpulkan informasi teknologi baru curahan waktu penyuluh meningkat dibandingkan dengan model kelembagaan sentralisasi. Hal ini disebabkan pada kedua model kelembagaan tersebut terdapat perubahan tugas pokok penyuluh. Pada model kelembagaan sentralisasi, penyuluh di tingkat kecamatan maupun kabupaten, mendapat asupan informasi sifatnya relatif seragam dari pusat terkait teknologi baru. Sementara pada model kelembagaan desentralisasi, Penyuluh harus mencari sendiri informasi teknologi sesuai dengan kebutuhan informasi kelompok tani binaannya atau informasi teknologi baru spesifik lokasi.

Setelah perhitungan diatas maka hasilnya dapat digambarkan sebagai berikut (Gambar 1).

## **SIMPULAN**

Pengaruh BP3K dan BPP secara bersama-sama mempengaruhi program penyuluhan peternakan adalah sebesar 57,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang dipengaruhi. Pengaruh BP3K yang secara langsung menentukan proses penyusunan program penyuluhan peternakan adalah sebesar 18 %. Sedangkan pengaruh BPP yang secara langsung menentukan proses penyusunan program penyuluhan peternakan adalah sebesar 64,7 %. Hal ini menunjukkan bahwa peran BP3K dalam penyusunan program penyuluhan peternakan masih lemah dan mengindikasikan lemahnya koordinasi dengan Dinas Peternakan. Sehingga perlu meningkatkan koordinasi teknis dalam mesinergikan program antara dinas teknis yang terkait dengan lembaga penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten, Mengintegrasikan antara program dinas peternakan dengan program dari BP3K dan Meningkatkan peran BPP ditingkat kecamatan sebagai lembaga

penyuluhan yang mengakomodir kegiatan bidang pertanian maupun peternakan

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Faqih, A. (2014). Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Terhadap Kinerja Kelompok Tani. *Jurnal Agrijati*, 26(1). 41-60
- Mardikanto, T. (2009). Sistem Penyuluhan Pertanian. Surakarta: UNS Press.
- Sajow, N., Sondakh, B. F. J., Legrans, R. A. J., Lainawa, J. (2014). Evaluasi Program Penyuluhan Usaha Peternakan Sapi Di Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal ZooteK ("ZooteK" Journal)*, 34(2). 27-38.
- Prajanti, S. D. W., & Waridin. (2010). Model Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian dalam Meningkatkan Kinerja Usahatani Melalui Transaction Cost Studi Empiris di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(1). 13-29
- Sugiyono. (1994). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Yunasaf, U., & Tasripin, D. S. (2011). Peran Penyuluh dalam Proses Pembelajaran Peternak Sapi di KSU Tandangsari Sumedang. *Jurnal Ilmu Ternak*, 12(1). 41-46.